



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Lampaui Target Pendapatan Daerah pada 2023, Pemprov DKI Jakarta Raih WTP Tujuh Kali Berturut

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada 25 Juli 2024 lalu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikannya untuk ketujuh kali secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2023. Predikat ini diberikan berkat optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta keberhasilan melebihi target pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, raihan ini merupakan hasil kerja keras, konsistensi, keseriusan, serta kebersamaan kerja lintas jajaran di Pemprov

DKI Jakarta. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara profesional.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintah-

an dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," ujarnya.

Ia melanjutkan, rekomendasi hasil pemeriksaan dapat mendorong seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami juga berterima kasih kepada pimpinan dan para anggota legislatif atas sinergi yang baik dalam mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah yang baik," imbuh Pj. Gubernur Heru.

Lebih lanjut, ia memaparkan, LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp 71,07 triliun atau 100,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp 70,66 triliun. Terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Selain itu, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp

72,14 triliun. Dengan komponen Realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

"Upaya yang telah kami lakukan masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, saya mengharapkan bimbingan, saran, serta masukan yang membangun dari BPK

RI dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan ini," pungkas Pj. Gubernur Heru.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.